

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM. PROV. NTB.
2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/
INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR
RSUP/UPTD/UPTB : BIDANG PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM
3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : SEKSI PENYULUHAN KOPERASI

Lampiran 14. A

NO	NAMA PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluhan Perkoperasian :	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kelompok masyarakat - Adanya permohonan dari kelompok masyarakat untuk disuluh. - Koordinasi dengan kelompok yang akan disuluh. - Pelaksanaan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi. - Daftar hadir peserta yang akan disuluh. - Tempat dan waktu pelaksanaan penyuluhan. 	-	1(satu) hari	1.UU.No.25Tahun1992TentangPerkoperasian. 2.UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4.Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	
2.	Sosialisasi Pengembangan Kader Koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Kader dari anggota koperasi calon peserta. - Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se-NTB. - Pembentukan Panitia di tingkat Kabupaten/Kota. - Persiapan pelaksanaan sosialisasi oleh tim penyuluh Propinsi. - Pelaksanaan sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya anggota koperasi yang belum memahami bagaimana berkoperasi yang baik untuk nantinya disebarkan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. - Anggota Gerakan koperasi dan masyarakat pada umumnya memerlukan informasi tentang perkoiperasian. 	-	1 (satu) hari	1. UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2. UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.PP. No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. 3. Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4. Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	

NO	NAMA PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Sosialisasi Pengawasan Intern/extern koproasi	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Pengurus/Pengawas koperasi calon peserta - Adanya permohonan dari Pengurus/Pengawas dan Manager untuk disuluh. - Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota se-NTB. - Pembentukan panitia di Kabupaten/Kota - Pelaksanaan penyuluhan 	- Adanya Pengurus/Pengawas dan Manager koperasi yang belum memahami bagaimana sistim pengawasan yang baik sesuai petunjuk yang berlaku.	-	1(satu) hari	1.UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2.UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4.Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 6.Angaran Dasar dan angaran rumah tangga koperasi.	
4.	Sosialisasi Pemeringkatan Koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Pengurus/Pengawas koperasi calon peserta - Adanya permohonan dari Pengurus/Pengawas dan Manager untuk disuluh. - Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota se-NTB. - Pembentukan panitia di Kabupaten/Kota - Pelaksanaan penyuluhan 	- Adanya Pengurus/Pengawas dan Manager koperasi yang belum memahami bagaimana sistim pengawasan yang baik sesuai petunjuk yang berlaku.	-	1 (satu) hari	1. UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2. UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3. PP. No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. 4. Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 5. Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 6. Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 7. Kepmen Nomor :22/Per/M/IV/2007 tentang pemeringkatan koperasi	